

BAB III

KONFLIK POLITIK DI KABUPATEN GARUT PADA MASA

PEMERINTAHAN R.A.A. SOERIA KERTALEGAWA

Awal pemerintahan R.A.A Soeria Kertalegawa merupakan masa resistensi rakyat pribumi secara menyeluruh dalam rangka memerangi kolonial Belanda yang dianggap sebagai kaum kafir dan harus disingkirkan dari negeri yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Hal ini mengakibatkan munculnya perlawanan-perlawanan diberbagai daerah, yang pada dasarnya berupa konflik keagamaan. Kemudian berpadu dengan konflik-konflik sosial, ekonomi, dan politik yang didukung dengan banyaknya bermunculan organisasi-oraganisasi sosial sebagai simbol lahirnya kebangkitan bangsa. Kegagalan panen dan efek Perang Dunia I membuat bahan pangan berkurang dan harga-harga bahan pokok melambung tinggi. Orang-orang sulit untuk mendapatkan beras.

Peristiwa ini terjadi di desa Cikendal kawedanan Leles kabupaten Garut, pada tanggal 7 Juli 1919. Wedana Leles, yaitu R. Soerianatamihardja. Pada waktu itu pemerintah kolonial menetapkan bahwa para petani harus menjual sejumlah tertentu hasil panen padinya kepada pemerintah. Setiap petani yang memiliki sawah seluas 5 bahu atau lebih, wajib menjual padinya kepada pemerintah sebanyak 4 pikul dari setiap bahu. Jika kurang dari 5 bahu mengikuti peraturan secara umum. Dan jika kurang dari setengah bahu, petani bebas dari kewajiban tersebut. Harga padi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 4,5 gulden/pikul. Harga ini di bawah rata-rata harga padi yang berlaku di pasar.

Haji Hasan di Cimareme, seorang Kiayi ahli ilmu kebatinan menolak tindakan pemerintah itu sebagai orang yang setahun sebelumnya dipaksa memusnahkan tanamannya dan menggantinya dengan padi(sebelumnya terkenal sebagai *juragan tembakau*),²² Haji Hasan merasa keberatan atas ketentuan tersebut bukan tentang harga, tapi tentang ketentuan jumlah. Saat itu, Pemerintah kolonial ini ingin membayar uang muka pembelian padi milik Haji Hasan sebanyak 40 pikul. Tetapi uang itu ditolak, karena Haji Hasan hanya bersedia menjual padinya kepada pemerintah sebanyak 10 pikul. Keberanian Haji Hasan menolak uang dari pejabat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dibalas dengan sikap arogan. Wedana Leles yang emosi mengancam akan mendatangkan pejabat pemerintah dan pasukan bersenjata lengkap untuk menyita sawah Haji Hasan.

Setelah itu, Haji Hasan mengirimkan surat kepada Asisten Residen agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya. Ia meminta agar peraturan penjualan padi di Garut disamen dengan daerah-daerah lainnya, yakni satu bahu sebanyak satu pikul. dan menanyakan kebijakan pemerintah membeli 40 pikul padi miliknya. Permohonan Haji Hasan ditolak oleh asisten residen.

Hal ini membuatnya bersikap lebih keras. Ia bersama keluarganya mempersiapkan perlawanan jika pemerintah secara paksa mengambil padinya. Haji Hasan tidak yakin bahwa kebijaksanaan wedana ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Sebenarnya beliau pun akan bersedia mentaatinya. Tetapi di pihak lain, agaknya pemerintah kolonial tetap menganggap penolakan Haji Hasan

²² Suminto, H. Aqib. (1985) *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche zaken*. Jakarta : LP3ES, hlm 228

untuk mematuhi ketentuan penjualan padi tersebut sebagai suatu pembangkangan, sehingga meletuslah peristiwa 7 Juli 1919.²³

Atas tekanan Asisten Residen yang memerintah, sikap Haji Hasan yang bersiap untuk “perang sabil” ini membuat pemerintah murka.²⁴ Asisten Residen segera memerintahkan Bupati Garut, R.A.A. Soeria Kertalegawa, untuk mengirim pasukan Marsose ke kediaman Haji Hasan. Sebanyak 40 orang infantri di bawah pimpinan Mayor Van Der Bie dan Letnan Hillen berangkat ke Garut. Mereka hendak melakukan penangkapan terhadap Haji Hasan. Pasukan bersenjata dari Tasikmalaya yang berjumlah 30 orang di bawah pimpinan Komandan Raes juga ikut diterjunkan untuk menangkap Haji Hasan. Setelah terjadi pembicaraan hampir dua jam, Haji Hasan diperintahkan agar ikut ke Garut, tapi dia malah masuk rumah dan diikuti yang lain. Setelah menutup pintu dan jendela, kemudian mereka berzikir bersarna, sementara perintah keluar rumah terus diteriakkan dari luar. Sudah dua kali diberikan tembakan sebagai peringatan, namun mereka tetap berzikir dengan suara yang semakin lantang. Akhirnya tembakan ketiga benar-benar diarahkan ke rumah, sehingga jatuhlah beberapa korban.

Dengan tembakan-tembakan yang banyak menimbulkan korban yaitu 7 orang mati diantaranya Haji Hasan sendiri.²⁵ Beliau ditemukan tewas bersimbah darah. Kepalanya yang diikat dengan jimat, tertembus peluru. Begitu juga dengan

²³ Ibid, 229.

²⁴ Anggapraja, R. Sulaeman. (1997). *Sejarah Garut dari Masa ke Masa*. Garut. Hlm 207

²⁵ Ibid, 207.

beberapa pengikutnya tewas. dan 19 orang luka-luka. Peristiwa tersebut terkenal dengan nama "*Genjlong Garut*".²⁶

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Pemerintah, untuk kepentingan penyelidikan gerakan perlawanan di Divisi Garut, terhitung sejak tanggal 9 Juli 1919, selama dianggap cukup, tiga orang Perwira Kehakiman Darat, salah satunya bergelar Djaksa.²⁷ Surat keputusan tersebut bertujuan untuk menyelidiki peristiwa Cimareme ini. Peristiwa Cimareme atau *Genjlong Garut* mempengaruhi juga kepada pelajar sekolah dan calon guru. Walaupun ada larangan yang keras para pelajar sekolah tidak boleh mengunjunginya, serta tidak heran kalau sesudahnya keluar dari sekolah kemudian banyak yang terjun dalam pergerakan.

Dalam perkembangan selanjutnya, peristiwa Garut ini kemudian ternyata sangat erat dikaitkan dengan masalah jimat dan Afdeeling B serta Sarekat Islam. Isyu yang berkembang kemudian bukan lagi masalah pembelian padi, melainkan masalah adanya komplotan rahasia bernama Afdeeling B, yang sedang menyusun kekuatan untuk memberontak kepada pemerintah. Dengan dernikian situasi pun menjadi berubah. Bukan lagi pemerintah yang harus mawas diri dalam persoalan. Peraturan wajib jual padi dan pelaksanaannya, tapi Sarekat Islamlah yang harus tampil sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang

²⁶ Sanusi Muhamad. (1919) *GENJLONG GARUT*, surat kabar Pajajaran lampiran hlm 200

²⁷ *NEDERLANDSCH-INDIË Batavia, 23 Augustus 1919. (Vervolg van het Eerste Blad.) Gouvernements-besluit hlm 13*

dituduhkan kepadanya. Itulah sebabnya mengapa suara dari pihak pribumi dalam hal ini selalu bernada membela diri.²⁸

Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan Politik Etis terhadap pribumi pada awal abad ke-20 M. Kebijakan ini membawa perubahan corak pergerakan masyarakat yang ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pergerakan yang memiliki tujuan dan langkah-langkah yang lebih terstruktur, terorganisir dan menjadi sebuah model pergerakan baru yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Salah satunya ialah organisasi Islam yaitu Sarekat Islam.²⁹ Sarekat Islam adalah salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia yang didirikan pada akhir tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Kampung Lawean, Solo. Organisasi ini bermula sebagai sebuah perkumpulan kaum pedagang muslim menengah, yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Namun pada saat HOS Tjokroaminoto masuk dalam struktur kepengurusan organisasi ini, ia mengubah nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dengan tujuan yang lebih luas.³⁰

Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto dengan Surabaya sebagai pusat pergerakannya, tidak perlu waktu lama Sarekat Islam mulai menapaki jalan kemajuan dan memperoleh banyak pendukung dari seluruh Jawa. Beberapa upaya dilakukan untuk menjadikan Sarekat Islam sebagai sebuah organisasi

²⁸ Suminto, H. Aqib. (1985) *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche zaken*. Jakarta : LP3ES, hlm 233

²⁹ Tsabit Azinar Ahmad, "Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri Di Semarang 1917-1920," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 8, no. 2 (2014) hlm 225.

³⁰ A. P. E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: PT Grafitipers, 1985), hlm 12.

nasional. Tjokroaminoto pun mulai mengubah jalur pergerakan Sarekat Islam dari jalur ekonomi menjadi jalur politik.³¹

Akibat peristiwa tersebut, kondisi perpolitikan Garut menjadi kacau dan pemerintah dianggap gagal. Wedana Leles, yaitu R. Soerianatamihardja diberhentikan, sementara Bupati R.A.A Soeria Kertalegawa tetap dipertahankan meskipun Komisaris Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Arab, Dr.G.A.J Hazeu di akhir laporannya mengajukan saran agar bupati Garut diberhentikan dengan hormat.³²

³¹ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm 94

³² Hajati, Chusnul. (1990). *Peristiwa Cimareme tahun 1919; Perlawanan H. Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hlm 84